



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YOSEPH PUGUH EKO SETIAWAN**

Jabatan : **Plt. Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **WIRANTO**

Jabatan : **Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI**

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua,

WIRANTO

Pihak Pertama,

YOSEPH PUGUH EKO SETIAWAN

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN**

Unit Organisasi : Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM

Tahun Anggaran : 2019

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
Meningkatnya Penegakan Hukum Yang Bebas Korupsi, Berkualitas dan Terpercaya	1. Persentase <i>debottlenecking</i> penataan regulasi yang ditindaklanjuti (simplifikasi, harmonisasi, penyusunan)	50%
	2. Persentase <i>debottlenecking</i> penyelesaian kasus hukum yang ditindaklanjuti	50%
	3. Persentase <i>debottlenecking</i> penyelesaian perjanjian dan sengketa hukum internasional yang ditindaklanjuti	50%
	4. Persentase <i>debottlenecking</i> penyelesaian pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti	50%
Terwujudnya daya dukung manajemen unit organisasi yang berkualitas	5. Nilai akuntabilitas kinerja	77
	6. Persentase realisasi penyerapan anggaran	90%

Jumlah Anggaran Program:

Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada Bidang Hukum dan HAM Rp. 14.400.000.000,- (empat belas milyar empat ratus juta rupiah).

Jakarta, Januari 2019

Menko Polhukam



WIRANTO

**Plt. Deputi Bidang Koordinasi
Hukum dan HAM**



YOSEPH PUGUH EKO SETIAWAN